



PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2025



INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan. Untuk melaksanakan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah (lima tahunan) ataupun jangka pendek (satu tahunan). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-empat dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2021-2026.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif merupakan rencana awal selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang pengawasan. Rancangan Rencana Kerja Inspektorat ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Demikian dengan telah disusunnya Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini dan dengan mengharap limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, semoga kami mampu meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, April 2024

The seal is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO' around the top and 'INSPEKTORAT' in the center, flanked by two stars. A signature is written over the seal.
**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**
Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4 SISTEMATIKA DAN TUJUAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022.....	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	47
3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	56
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (yang selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri meliputi persiapan penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan Perkada.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati Mojokerto tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD menjadi RKPD. Kemudian RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, bahwa susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri atas Inspektur, Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian dan Kelompok /jabatan Fungsional, Inspektur Pembantu yang membawahi

Kelompok Jabatan Fungsional dan Inspektur Pembantu Khusus yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain maupun Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto terpilih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “;

- 3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang

- Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 26) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
 - 27) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten Mojokerto;

28) Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/2296/416-060/2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2021 – 2026;

29) Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/68/416-160/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dimaksudkan agar perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan mampu menjadi pedoman dan tolak ukur Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah menentukan arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar supaya para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto menjadi terarah dan terukur sesuai dengan perencanaan, serta mampu mencapai keberhasilan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, serta susunan garis besar isi dokumen adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik berisi tentang latar belakang penyusunan rancangan rencana kerja, maksud dan tujuan, dan dasar alternatif penyusunan hubungan dokumen perencanaan lainnya, evaluasi kegiatan tahun lalu, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat

Kabupaten Mojokerto tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat hal-hal yang terkait dengan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan pendanaannya, yaitu antara lain:

- a. Indikator kinerja
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi kegiatan
- d. Kebutuhan dana indikatif; dan
- e. Sumber dana

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2023.

Total anggaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 APBD Murni sebesar Rp14.64.350.906,00. Terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp14.537.271.906,00
- Belanja Modal Rp77.079.000,00

Realisasi sebesar Rp 12,986,327,206.00 terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp 12,923,016,206.00
- Belanja Modal Rp 70,375,000.00

Sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1,628,023,700.00 terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp 1,614,255,700.00
- Belanja Modal Rp 6,704,000.00

Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 sebesar Rp12,986,327,206.00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,91%. dan capaian kinerja kegiatan sebesar 107.41 % Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan berhasil dengan baik dalam pencapaian kinerja hingga Tahun 2023. Untuk rincian capaian kinerja kegiatan dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel TC 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat	86,00 (A)	83,12(A)	83,16 (A)	85,45	102,36%	83,18 (A)		
		INOVASI		1		1	100%	1		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	10 dokumen		
	Rincian :									
	<i>Penyusunan Dokumen Renstra</i>	Dokumen Renstra	1 dokumen	2 dokumen	0	0	100%	5 dokumen		
	<i>Penyusunan Dokumen Renja</i>	Dokumen Renja yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen		
	<i>Penyusunan Dokumen Renja Perubahan</i>	Dokumen Renja Perubahan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5 laporan	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	10 dokumen		
	Rincian :									
	<i>Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan</i>	Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen		
	<i>Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dokumen Laporan Kinerja	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96%	92,70%	88,00%	88,86%	104,46%	95,00%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan	56 orang/bulan	1 Tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	14 dokumen		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan Gaji ASN</i>	Orang yang menerima gaji	1 tahun	1 Tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	14 dokumen		
	<i>Penyediaan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)</i>	Orang yang menerima tunjangan dan TPP								
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan	12 dokumen	14 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
	Rincian :									
	<i>Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</i>	Dokumen LPJ	12 dokumen	14 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	90,39	54	62	85,1	139,51%	63		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	-	67 orang	0	0	100%	67 set		
	Rincian :									
	<i>Biaya penyediaan pakaian dinas ASN</i>	Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas		67 orang	0	0	100%	67 set		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 unit	1 paket	1 paket	100%	24 unit		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Jumlah unit komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 unit	1 paket	1 paket	100%	24 unit		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	2 Paket	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman	380 Paket	60 kali	360 kali	360 kali	100%	60 kali		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat</i>	Paket penyediaan makanan dan minuman rapat	380 Paket	60 kali	360 kali	360 kali	100%	60 kali		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 kali	1 paket	1 paket	100%	12 paket		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan barang cetakan</i>	Paket barang cetakan	1 paket	6 kali	1 paket	1 paket	100%	6 paket		
	<i>Penggandaan / foto copy</i>	Jumlah lembar foto copy dokumen		6 kali	1 paket	1 paket	100%	6 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Dokumen	65 Eksemplar	65 Dokumen	65 Dokumen	100%	65 Eksemplar		
	Rincian :									
	<i>penyediaan surat kabar dan bahan bacaan lainnya</i>	Jumlah surat kabar dan bahan bacaan lainnya	65 Dokumen	65 Eksemplar	65 Eksemplar	65 Eksemplar	100%	65 Eksemplar		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang Disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map DLL	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	Paket penyediaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	60 kali	12 Bulan	12 Bulan	100%	60 kali		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu</i>	Laporan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu	12 Laporan	60 kali	12 Bulan	12 Bulan	100%	60 kali		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	24 Laporan	96 kali	24 Laporan	24 Laporan	100%	96 kali		
	Rincian :									
	<i>Biaya perjalanan dinas dalam daerah ASN Inspektorat</i>	Laporan perjalanan dinas dalam daerah	12 Laporan	48 kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	48 kali		
	<i>Biaya perjalanan dinas luar daerah ASN Inspektorat</i>	Laporan perjalanan dinas luar daerah	12 Laporan	48 kali	12 Laporan	12 Laporan	100%	48 kali		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, perangko dan materai	10 paket	500 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	500 paket		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan paket pengiriman dokumen</i>	Laporan penyediaan paket pengiriman dokumen	10 paket	500 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	500 paket		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya tagihan biaya telepon, internet, dan listrik	24 Laporan	12 bulan	24 Laporan	12 Laporan	100%	12 bulan		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan jasa Komunikasi dan wifi</i>	Laporan penyediaan jasa komunikasi dan wifi	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 bulan		
	<i>Penyediaan jasa Listrik</i>	Laporan penyediaan jasa listrik	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		
	Rincian :									
	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (8 orang)</i>	Laporan Penyediaan Jasa Kerja Harian Lepas selama 1 tahun (8 orang)	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	93%	74 unit	94%	100%	75 Unit		
								5 Lokasi		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan		
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	16 Unit	14 unit	16 unit	16 unit	100%	14 unit			
	Rincian :										
	<i>Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</i>	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16 Unit	7 unit	16 unit	16 unit	100%	7 unit			
	<i>Biaya perizinan dan pajak kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang telah dibayar PKB	16 Unit	7 unit	16 unit	16 unit	100%	7 unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 Unit	1 unit kompleks	1 unit	1 unit	100%	1 unit kompleks			
	Rincian :										
	<i>Biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	Jumlah waktu pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	1 Unit	1 unit kompleks	1 unit	1 unit	100%	1 unit kompleks			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 Unit	60 unit	60 unit	60 unit	100%	60 unit			
	Rincian :										
	<i>Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor</i>	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor	60 Unit	60 unit	60 unit	60 unit	100%	60 unit			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		87%	87%	91,00	102,87%	88%			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Jumlah laporan pengawasan Internal	181 laporan	216 laporan	149 laporan	149 Laporan	100%	477 laporan			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	1 laporan	1 LHP	1 LHP	1 LHP	100%	4 LHP			
	Rincian :										

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	<i>Menilai kinerja pelaksanaan program meliputi 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) Audit (57 PD)</i>	Jumlah Laporan Audit Kinerja	1 laporan	1 LHP	1 LHP	1 LHP	100%	4 LHP		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	103 laporan	116 Laporan	49 Laporan	34 Laporan	69%	116 Laporan		
	Rincian :									
	<i>Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan		16 laporan	16 laporan	8 laporan	50%	16 laporan		
	<i>Evaluasi Pengelolaan Dana BOS</i>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		50 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	50 laporan		
	<i>Monitoring pengelolaan keuangan daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		50 laporan	29 laporan	22 laporan	76%	50 laporan		
	<i>Evaluasi Pengelolaan BUMD</i>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi			1 laporan	1 laporan	100%			
	<i>Pemeriksaan Kas dan Persediaan Akhir Tahun</i>	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan			1 laporan	1 laporan	100%			
	<i>Evaluasi Hibah</i>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi			1 laporan	1 laporan	100%			
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	49 laporan	141 laporan	59 laporan	59 Laporan	100%	50 laporan		
	Rincian :									
	<i>Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)</i>	Evaluasi SAKIP OPD		70 laporan	58 laporan	58 laporan	100%	25 laporan		
	<i>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</i>	Reviu LPPD		71 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	25 laporan		
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil reviu laporan keuangan	8 laporan	8 LHR	17 Laporan	17 Laporan	100%	8 LHR		
	Rincian :									
	<i>Reviu Laporan Keuangan (LKPD)</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu		4 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	4 LHR		
	<i>Reviu Penyerapan Anggaran</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran		2 LHR	4 LHR	4 LHR	100%	2 LHR		
	<i>Reviu DAK Fisik</i>	Jumlah Hasil Reviu DAK Fisik		2 LHR	12 LHR	12 LHR	100%	2 LHR		
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18 laporan	299 LHP	36 Laporan	36 Laporan	100%	299 LHP		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Rincian :									
	<i>Pemeriksaan keuangan desa dan dana desa</i>	Laporan Hasil Pengawasan Desa		299 LHP	36 Laporan	36 Laporan	100%	299 LHP		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI yang terselesaikan	2 dokumen	90%	90%	90%	100%	90%		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		13 kali	2 dokumen	2 dokumen	100%	7 kali		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	28 laporan	100%	38 laporan	38 Laporan	100%	24 laporan		
		Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat		12 Kali	38 Laporan	38 Laporan	100%	6 kali		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (yuni)	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK dan Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	100%	4 laporan		
	Rincian :									
	<i>Unit Pengendalian Gratifikasi</i>	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (yuni)	- Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu, Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah, Jumlah persentase	24 laporan	20 Laporan	32 Laporan	34 Laporan	106%	20 Laporan		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan		
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)	
		penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat									
	Rincian :										
	<i>Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tematik atau insidental)</i>	Jumlah Laporan yang diperiksa berdasarkan tujuan tertentu	12 laporan	10 laporan	2 Tematik	1 Tematik	50%	10 laporan			
	<i>Penanganan Pengaduan Masyarakat</i>	Jumlah Laporan penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan Masyarakat	12 laporan	10 laporan	30 laporan	33 laporan	110%	10 laporan			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3+	3	3+	3+	100%	3+			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Jumlah orang ,Jumlah dokumen dan Jumlah pelaksanaan kegiatan	20 rekomendasi	4 dokumen	20 dokumen	20 Dokumen%	100%	4 dokumen			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Jumlah dokumen Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan - Jumlah dokumen penilaian Kapabilitas APIP	10 rekomendasi	5 dokumen	2 Dokumen 2 Kegiatan	2 Dokumen 2 Kegiatan	100%	4 dokumen			
	Rincian :										
	<i>Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3</i>	Dokumen penilaian mandiri Kapabilitas APIP	5 rekomendasi	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen			
	<i>Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengawasan</i>	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengawasan	5 rekomendasi	3 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100%	2 dokumen			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat	10 rekomendasi	58 orang	55 orang	55orang	100%	58 orang			
		Jumlah pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor		4 kali	2 Penilaian	2 Penilaian	100%	4 kali			
	Rincian :										

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP selama 1 tahun</i>	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti Diklat / Bimtek	5 rekomendasi	58 orang	55 orang	55 orang	100%	58 orang		
	<i>Tim Penilai Angka Kredit (PAK)</i>	Jumlah dokumen laporan penilaian angka kredit bagi Auditor dan Pengawas	5 rekomendasi	4 kali	2 Penilaian	2 Penilaian	100%	4 kali		
	Pendampingan dan Asistensi	- Jumlah dokumen, Jumlah pelaksanaan kegiatan	48 perangkat daerah	100%	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	100%	301 dokumen		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	48 perangkat daerah	3 Kali	48 Perangklat Daerah	48 Perangkat Daerah	100%	132 LHR		
	Rincian :									
	<i>Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah		3 Kali	132 LHR	132 LHR	100%	132 LHR		
	<i>RKPD</i>				1 LHR	1 LHR	100%			
	<i>P-RKPD</i>				1 LHR	1 LHR	100%			
	<i>Reviu RENJA dan Perubahan</i>				48 LHR	48 LHR	100%			
	<i>KUA-PPAS dan Perubahan</i>				2 LHR	2 LHR	100%			
	<i>RKA dan Perubahan</i>				114 LHR	114 LHR	100%			
	<i>Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)		3 Bulan	16 LHR	16 LHR	100%	20 LHE		
	<i>Evaluasi perencanaan dan Penganggaran berbasis gender (Responsive Gender) (mendukung kegiatan PUG)</i>	Jumlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		4 Kali	16 LHE	16 LHE	100%	18 kali		
	<i>Asistensi/pendampingan/Konsulting dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi/Pendampingan/konsulting yang dilakukan		3 Kali	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 kali		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM	48 perangkat daerah	12 OPD	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	48 OPD		
	Rincian :									
	<i>Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi		12 OPD	4 OPD	4 OPD	100%	48 OPD		
	<i>Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM		1 Kali	1 kali	1 kali	100%			
	<i>Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</i>	Jumlah Laporan Benturan Kepentingan		16 Kali	1 Laporan	1 Laporan	100%			
	<i>Penanganan Whistle Blowing System</i>	tindak lanjut penanganan tindak lanjut pengaduan melalui WBS		14 Kali	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
	<i>Evaluasi Pelayanan Publik</i>	Penilaian Pelaksanaan unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik		13 Kali	28 OPD	29 OPD + 3 OPD Penilaian dari MENPAN (32 OPD)	100%	12 OPD		
	<i>Reviu LHKPN</i>	Reviu atas kelayakan penyajian Laporan LHKPN		2 Kali	1 Laporan	1 Laporan	100%			
	<i>Verifikasi LHKASN</i>	Verifikasi Kelayakan penyajian Laporan LHKASN			1 Laporan	1 Lapoan	100%			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi, Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	12 kegiatan	48 Kali	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100%	48 Kali		
	Rincian :									
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pencapaian MCP		48 Kali	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	48 Kali		

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan		
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)	
	<i>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>										
	<i>Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Tindak lanjut SABER PUNGLI		8 Area intervensi	12 Kegiatan	21 Kegiatan	175%				
	<i>Sosialisasi Anti Korupsi</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi		3 Kali	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%				
	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Jumlah pelaksanaan kegiatan survey penilaian integritas	48 perangkat daerah	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	12 Kali			
	Rincian :										
	<i>Koordinasi Survei Penilaian Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Survei Penilaian Integritas (SPI)		1 Dokumen	6 kali	6 kali	100%	6 Kali			
	<i>Penilaian Zona Integritas</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas		1 Dokumen	4 OPD	4 OPD	100%	6 Kali			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pengawasan yang profesional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Pengawasan yang profesional memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat, yang keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik.

Terwujudnya *good governance* mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk berada pada front line perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026 maupun Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.

**Tabel 2.2 (Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2) TAHUN 2023	Tahun 2023 (thn n-1) TAHUN BERJALAN	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			83,14 (A)	83,16 (A)	85,10 (A)	85,45	83,18 (A)	83,20 (A)	
2	Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,94		70,1	70,2	74,0	77,0	70,4	70,5	
3	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Selesai Ditindaklanjuti		92%	87%	90%	89,5%	91%	88%	88%	
4	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah			87%	88,00%	90,88%	88,91%	96,00%	97,00%	
6	Level Kapabilitas (APIP)		Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 +	Level 3	Level 3	Level 3	
7	Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3,1	Level 3,3	
8	Indeks Profesionalitas ASN			61	80	85,10	90,36	63	64	

Berdasarkan tabel 2.2, Capaian rata-rata kinerja Inspektorat pada tahun 2022 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya serta menunjukkan kinerja yang baik pula. Peningkatan kinerja ini diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas SDM pemeriksa yang difasilitasi adanya kegiatan diklat guna untuk mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

1. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-1 terkait Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 102,3%. Pencapaian predikat A (Memuaskan), merupakan akumulasi

penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.3
AKUMULASI PENILAIAN KOMPONEN AKIP

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	25,65
Pengukuran Kinerja	30,00	26,00
Pelaporan Kinerja	15,00	13,09
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	85,45

2. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-2 terkait Nilai Survey Penilaian Integritas tercapai sebesar 109,68%, ralisasi Nilai Survey Penilaian Integritas tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,96% dari tahun 2022 dengan hasil nilai sebesar 74,0 menjadi 77,00 di tahun 2023.
3. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait dengan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tercapai sebesar 91% tercapai 101% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam hal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal telah dioptimalkan, dalam bentuk peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan obrik pemeriksaan serta perangkat daerah terkait.
4. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-4 terkait Persentase Indikator Program Perangkat Daerah tercapai sebesar 100%. Program Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri dari :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
5. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-5 terkait Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tercapai sebesar 101%, dari target 88% dengan realisasi sebesar 88,91%.
6. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-6 terkait Level Kapabilitas APIP tercapai sebesar 100% dari target level 3+ dengan realisasi 3+ (skor 3,000).
7. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin-8 terkait Nilai Maturitas SPIP tercapai sebesar 105,33% dari target level 3 dengan perolehan nilai 3,1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas

penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

8. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja ke-8 terkait Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tercapai sebesar 113%, dari target 80 dengan realisasi sebesar 90,36.

Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	Target tIKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023(thn n-1)	Tahun 2022(thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024(thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13
1	Nilai Survey Penilaian Integritas	72,4		70,1	70,2	74,4	77,3	74,3	74,4	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat			70,1	70,2	82,63	82,63	70,3	70,3	
3	Nilai Maturitas SPIP			3	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	

Berdasarkan Tabel 2.3 tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto, bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator pertama yaitu Nilai Survey Penilaian Integritas capaian nilai pada tahun 2022 adalah 74,0 sedangkan pada tahun 2023 realisasi yang dicapai adalah 77,3 yang bisa diartikan bahwa capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022;
2. Pada indicator kedua yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat pencapaian nilai yang didapat Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah 82,63 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 nilai yang dicapai mengalami kenaikan;
3. Sedangkan pada indicator ketiga yaitu Nilai Maturitas SPIP mengalami kenaikan diangka 3,16 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang berada di nilai 3,1.

Dari keseluruhan indicator kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto rata-rata tercapai lebih dari 100% dengan kategori sangat baik.

Pembahasan SPI (Survey Penilaian Integritas) yang menjadi indicator Tujuan

Inspektorat adalah sebagai berikut, pada RENSTRA Inspektorat Tahun 2021-2026 BAB V (Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto) yang efektif akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa :

- a. Tujuan Inspektorat adalah : Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
- b. Dengan Indikator Tujuan : Nilai Survey Penilaian Integritas Indikator;
- c. Target Nilai SPI pada tahun 2022 adalah 70,1

Dari pernyataan diatas, dapat kami simpulkan bahwa salah satu tugas berat Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah nilai SPI, bukan lagi WTP yang telah dibebankan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

Pada paragraf berikutnya kita akan membahas terkait target dan pelaksanaan penilaian SPI pada tahun 2023, dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) di 93 kementerian/Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh KPK. Hasil keseluruhan peserta SPI 2023 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada diangka 72.0 sementara Kabupaten Mojokerto mendapatkan skor sebesar 77,3.

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan. Secara berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari perubahan tersebut Hasil Survei Penilaian Integritas 2023 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Kabupaten Mojokerto :

1. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini memiliki risiko korupsi yang tinggi, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan.
2. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.
3. Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat

terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

4. Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
5. Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
6. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan. Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional.
7. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
8. Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada di bawah rata-rata nasional, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
9. Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/melaksanakan tugas.
10. Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media

pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi Aceh dapat melakukan beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

1. Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan;
2. Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut:
 - a) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
 - b) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten.
 - c) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi
 - d) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.
3. Perbaiki mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
4. Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:
 - a) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - d) Mengintensifkan penggunaan vendor management system;
 - e) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan;
 - f) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1) Penguatan birokrasi yang bersih;
- 2) Penguatan integritas ASN;
- 3) Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;
- 6) Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan
- 7) Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Berdasarkan rancangan penyusunan RKPD Tahun 2024 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto selaku APIP, maka kebutuhan dana yang diusulkan untuk pendanaan program dan kegiatan diharapkan dapat memenuhi kelancaran dalam mencapai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 2.6 (Tabel T-C 31 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN MOJOKERTO	NILAI HASIL EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT	85,00 (A)	16.308.197.147	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN MOJOKERTO	NILAI HASIL SAKIP INSPEKTORAT	85,00 (A)	11.588.217.000
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	45.796.000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	100%	8.000.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	22.898.000	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	4.000.000
	Rincian					Rincian				
	1. Penyusunan Dokumen Renstra;					1. Penyusunan Dokumen Renstra				
	2. Penyusunan Dokumen Renja;					2. Penyusunan Dokumen Renja;				
	3. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan					3. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan				
	Sub Kegiatanm : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5 laporan	22.898.000	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.000.000
	Rincian :					Rincian :				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	1. Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan					1. Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan				
	2. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah					2. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah				
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	14.603.303.293	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	10.620.462.00 0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan	56 Orang/bulan	14.580.405.293	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	10.620.462.00 0
	Rincian :					Rincian :				
	1. Penyediaan Gaji ASN					1. Penyediaan Gaji ASN				
	2. Penyediaan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)					2. Penyediaan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan	12 dokumen	22.898.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0
	Rincian :					Rincian :				
	1. Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan					1. Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan				
	Sub Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	90,38	62.969.500	Sub Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	90,38	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0
						Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	0
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	66 paket	62.969.500	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket	0
						Rincian				
						1. Biaya Penyediaan pakaian dinas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	807.154.500	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	547.710.215
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 paket	11.449.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan	24 Paket	5.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan komponen Listrik/penerangan bangunan kantor					1. Penyediaan komponen Listrik/penerangan bangunan kantor				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	2 paket	228.980.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LED, Printer dll.	2 Paket	46.095.215
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor					1. Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	380 paket	45.796.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	380 Paket	255.000.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan makan dan minuman rapat					1. Penyediaan makan dan minuman rapat				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	85.867.500	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.021.016
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan Barang Cetak					1. Penyediaan Barang Cetak				
	2. Penggandaan/Foto Copy					2. Penggandaan/Foto Copy				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Eksemplar	11.449.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	65 Dokumen	5.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
								Undangan yang Disediakan		
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan Surat Kabar dan bahan bacaan lainnya					1. Penyediaan Surat Kabar dan bahan bacaan lainnya				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah ATK yang Disediakan	1 paket	171.735.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket/ Bahan Material yang Disediakan	1 Paket	55.593.984
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan alat tulis kantor					1. Penyediaan alat tulis kantor				
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan makann dan minuman	12 laporan	22.898.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan makan dan minum untuk tamu					1. Penyediaan makan dan minum untuk tamu				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	24 laporan	228.980.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	127.000.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN Inspektorat					1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN Inspektorat				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN Inspektorat					2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN Inspektorat				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	830.631.994	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	255.300.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Menyurat, perangko dan materai	10 paket	10.304.100	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Paket	0
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan paket pengiriman dokumen					1. Penyediaan paket pengiriman dokumen				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	24 laporan	138.303.920	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	120.800.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Wifi					1. Penyediaan Jasa Komunikasi Wifi				
	2. Penyediaan Jasa Listrik					2. Penyediaan Jasa Listrik				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 laporan	153.783.334	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	134.500.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
								yang Disediakan		
	Rincian					Rincian :				
	1. Penyediaan jasa tenaga kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (9 orang)					1. Penyediaan jasa tenaga kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (9 orang)				
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	314.847.500	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	94%	156.744.785
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	16 unit	13.738.800	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	16 Unit	52.840.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/operasional					1. Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/operasional				
	2. Biaya Perizinan dan Pajak kendaraan Dinas/Operasional					2. Biaya Perizinan dan Pajak kendaraan Dinas/Operasional				
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 unit	266.761.700	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 Unit	73.904.785
	Rincian					Rincian :				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	1. Biaya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor					1. Biaya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 unit	34.347.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	60 unit	30.000.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor					1. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90,3%	545.897.759
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah laporan pengawasan Internal Persentase penyelesaian TLHP Jumlah pelaksanaan rakorwas	181 laporan	10.856.479.700	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	181 Laporan	400.897.759
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	4 laporan	171.735.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	1 Laporan	26.825.750
	Rincian					Rincian :				
	1. Menilai Kinerja pelaksanaan program meliputi 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)					1. Menilai Kinerja pelaksanaan program meliputi 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)				
	2. Audit (57 OPD)					Rincian :				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	103 laporan	515.205.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	52 Laporan	111.300.350
	Rincian					Rincian :				
	1. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah					1. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	2. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS					2. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS				
	3. Monitoring pengelolaan keuangan daerah					3. Monitoring pengelolaan keuangan daerah				
	4. Evaluasi pengelolaan BUMD					4. Evaluasi pengelolaan BUMD				
	5. Pemeriksaan Kas dan Persediaan Akhir Tahun					5. Pemeriksaan Kas dan Persediaan Akhir Tahun				
	6. Evaluasi Hibah					6. Evaluasi Hibah				
	Sub Bagian : Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	59 laporan	191.770.750	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	49 Laporan	28.495.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)					1. Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)				
	2. Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (LPPD)					2. Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah (LPPD)				
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan hasil Reviu Keuangan	8 laporan	234.704.500	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	51.043.300

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Rincian					Rincian :				
	1. Reviu Laporan Keuangan (LKPD)					1. Reviu Laporan Keuangan (LKPD)				
	2. Reviu Penyerapan Anggaran					2. Reviu Penyerapan Anggaran				
	3. Reviu DAK Fisik					3. Reviu DAK Fisik				
	Sub Kegiatan : Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18 laporan	721.287.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18Laporan	165.954.359
	Rincian					Rincian :				
	1. Pemeriksaan keuangan desa dan dana desa					1. Pemeriksaan keuangan desa dan dana desa				
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen	0	-	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan	0
	Rincian					Rincian :				
	1. Kersama pengawasan internal					1. Kersama pengawasan internal				
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab. Mojokerto	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	2 dokumen	515.777.450	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	17.279.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK					1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK				
	2. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP					2. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28 laporan	235.000.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28 Laporan	145.000.000
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	4 laporan	235.000.000	Sub Kegiatan : Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	4 Laporan	25.000.000
	Rincian					Rincian :				
	1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)					1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)				
	2. Penanganan Penyelesaian Keugian Negara					2. Penanganan Penyelesaian Keugian Negara				
	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	400.000.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	120.000.000
	Rincian					Rincian :				
	1 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tematik atau insidental);					1. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tematik atau insidental);				
	2 Penanganan Pengaduan Masyarakat					2 Penanganan Pengaduan Masyarakat				
	ROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Kab. Mojokerto	Level Kapabilitas APIP	3	2.057.300.000	ROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Kab. Mojokerto	Level Kapabilitas APIP	3	938.672.602

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	20 Rekomendasi	875.500.009	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	10 Rekomendasi	668.764.002
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokert	JUmlah Rekomendasi Kebijakan Teknis dibidang pengawasan yang disusun	10 Rekomendasi	217.500.000	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokert	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis dibidang pengawasan yang disusun	5 Rekomendasi	58.540.000
	Rincian :					Rincian :				
	1. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3					1. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3				
	2. Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengawasan									
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokert	JUmlah Rerkomendasi Kebijakan Teknis dibidang fasilitasi pengawasan	10 Rekomendasi	658.000.000	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab. Mojokert	JUmlah Rerkomendasi Kebijakan Teknis dibidang fasilitasi pengawasan	5 Rekomendasi	610.224.002
	Rincian :					Rincian :				
	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP selama 1 tahun					1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP selama 1 tahun				
	2. Tim Penilai Angka Kredit (PAK)					2. Tim Penilai Angka Kredit (PAK)				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	48 perangkat daerah	2.611.800.000	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	48 Perangkat Daerah	269.908.600
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan ASistensi Urusan Pemerintah Daerah	48 perangkat daerah	1.160.800.000	Sub Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	48 Perangkat Daerah	61.648.800
	Rincian :					Rincian :				
	1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;					1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;				
	2. RKPD					2. RKPD				
	3. P-RKPD					3. P-RKPD				
	4. Reviu RENJA dan Perubahan					4. Reviu RENJA dan Perubahan				
	5. KUA-PPAS dan Perubahan					5. KUA-PPAS dan Perubahan				
	6. RKA dan Perubahan					6. RKA dan Perubahan				
	7. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)					7. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	8. Evaluasi perencanaan dan Penganggaran berbasis gender (Responsive gender) (mendukung kegiatan PUG)					8. Evaluasi perencanaan dan Penganggaran berbasis				
	9. Asistensi/pendampingan/Konsulting dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah					9. Asistensi/pendampingan/ Konsulting dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi, penilaian Reformasi Birokrasi	48 perangkat daerah	350.000.000	Sub Kegiatan : Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi, penilaian Reformasi Birokrasi	48 Perangkat Daerah	50.000.000
	Rincian :					Rincian :				
	1. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi					1. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi				
	2. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi					2. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				
	3. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan					3. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan				
	4. Penanganan Whistle Blowing System					4. Penanganan Whistle Blowing System				
	5. Evaluasi Pelayanan Publik					5. Evaluasi Pelayanan Publik				
	6. Reviu LHKPN					6. Reviu LHKPN				
	7. Verifikasi LHKASN					7. Verifikasi LHKASN				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah pelaksanaan kegiatan KOordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	952.500.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah pelaksanaan kegiatan KOordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	26 Kegiatan	143.259.800
	Rincian :					Rincian :				
	1. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					1. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
	2. Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar					2. Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar				
	3. Sosialisasi Anti Korupsi					3. Sosialisasi Anti Korupsi				
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah	148.500.000	Sub Kegiatan : Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Mojokerto	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 Perangkat Daerah	15.000.000
	Rincian :					Rincian :				
	1. Koordinasi Survei Penilaian Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi					1. Koordinasi Survei Penilaian Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi				
	2. Penilaian Zona Integritas					2. Penilaian Zona Integritas				
TOTAL					22.780.976.847	TOTAL				13.072.787.361

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan; kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 (nomor 900.15.5.3406 tahun 2024) tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaal Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini; dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi/ MCP KPK Tahun 2024 pada Area Pengawasan APIP terkait alokasi anggaran Inspektorat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada point 1 diprioritaskan untuk penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, diantaranya :

1. Kegiatan pengawasan, yaitu :
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi rewiu RPJMD, rewiu RKPD, rewiu RKA- SKPD, rewiu LKPD, rewiu laporan kinerja, rewiu penyerapan anggaran, rewiu penyerapan pengadaan barang dan jasa, rewiu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota

- untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan
- d. Penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*.
 2. Kegiatan non pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 3. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain- lain.
- Usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut kami jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 (Tabel TC-32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (2024)	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.1
PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	Penerapan Good and Clean Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum optimal	1.1	Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP	1.1.1	Integritas ASN belum optimal pelaporan kinerja belum optimal.
				1.1.2	Penguatan SPIP pada masing-masing OPD belum optimal
		1.2	Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	1.2.1	ASN belum memahami ketentuan pengelolaan keuangan daerah
				1.2.2	Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih rendah.
				1.2.3	Kualitas Laporan keuangan Pemerintah daerah belum optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 melalui Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui program kegiatan setiaptahunnya guna untuk mencapai visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan capaian Misi Kepala Daerah yang terkait :

A. Tujuan

Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif

B. Sasaran

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

CASCADING KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN			
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel			
INDIKATOR TUJUAN			
Nilai Survey Penilaian Integritas			
SASARAN			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	
INDIKATOR SASARAN			
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai maturitas SPIP	
PROGRAM			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
INDIKATOR PROGRAM			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Level Kapabilitas APIP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun satu tahun yaitu 2025, meliputi program, kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2025 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel TC. 33 :

Tabel 3.2 (T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
6	1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah							
6	1 0 0 1 0	Inspektorat Kabupaten							
6	1 0 0 1 0	Inspektorat Kabupaten							
6	1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP 83,20 (A)	14,244,210,977	APBD		Nilai SAKIP 87,00 (A)	14,069.300.817
		INOVASI		1					
6	1 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	40,000,000	APBD		100%	40.000.000
6	1 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	10 dokumen	20,000,000	APBD		3 Dokumen	20.000.000
6	1 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	10 dokumen	20,000,000	APBD		5 Dokumen	20.000.000
6	1 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	96%	12,755,090,657	APBD		97%	12.735.090.657
6	1 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	14 dokumen	12,735,090,657	APBD		56 orang/bulan	

6	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 laporan	20,000,000	APBD		12 Dokumen	20.000.000
6	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	2 Laporan	-	APBD			
6	1	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kab. Mojokerto	13 Dokumen	-	APBD			
6	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	64	55,000,000	APBD		90,4	55.000.000
6	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab. Mojokerto	67 Paket	55,000,000	APBD		66 Paket	55.000.000
6	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	705,000,000	APBD		100%	325.000.000
6	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan	Inspektorat Kab. Mojokerto	24 Unit	10,000,000	APBD		24 Paket	10.000.000
6	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LED, Printer dll.	Inspektorat Kab. Mojokerto	25 Paket	200,000,000	APBD		2 Paket	200.000.000
6	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	60 kali	40,000,000	APBD		380 Paket	40.000.000
6	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Paket	75,000,000	APBD		1 Paket	75.000.000
6	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	65 Eksemplar	10,000,000	APBD		65 Dokumen	10.000.000
6	1	1	2	6	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	150.000.000

6	1	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kab. Mojokerto	60 kali	20,000,000	APBD		12 Laporan	20.000.000
6	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Mojokerto	96 kali	200,000,000	APBD		24 Laporan	200.000.000
6	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	-	-	APBD			
6	1	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	-	-	APBD			
6	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	264,120,320	APBD		100%	129.800.000
6	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab. Mojokerto	500 Paket	9,000,000	APBD		10 Paket	9.000.000
6	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Bulan	120,800,000	APBD		24 Laporan	120.800.000
6	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 Laporan	134,320,320	APBD		12 Laporan	134.320.320
6	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Inspektorat Kab. Mojokerto	95%	425,000,000	APBD		94%	275.000.000
6	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Kab. Mojokerto	16 Unit	12,000,000	APBD		16 Unit	12.000.000
6	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	2 Lokasi 4 Lokasi	233,000,000	APBD		1 Unit	233.000.000
6	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	60 unit	30,000,000	APBD		60 Unit	30.000.000

6	1	2				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kabupaten Mojokerto	88%		APBD		90,3%	2,738,000,000
6	1	2	2	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Inspektorat Kab. Mojokerto	477 laporan 86% 7 kali	2,103,000,000	APBD		181 Laporan	2.103.000.000
6	1	2	2	1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	4 LHP	150,000,000	APBD		1 Laporan	150.000.000
6	1	2	2	1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	116 laporan	450,000,000	APBD		103 Laporan	450.000.000
6	1	2	2	1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	50 laporan	167,500,000	APBD		49 Laporan	167.500.000
6	1	2	2	1	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	8 LHR	205,000,000	APBD		8 Laporan	205.000.000
6	1	2	2	1	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat Kab. Mojokerto	299 Laporan	630,000,000	APBD		18 Laporan	630.000.000
6	1	2	2	1	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat Kab. Mojokerto	2 dokumen	50,000,000	APBD		6 Kesepakatan	50.000.000
6	1	2	2	1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab. Mojokerto	90% 7 kali	450,500,000	APBD		2 Dokumen	450.500.000
6	1	2	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	46 Laporan	635,000,000	APBD		28 Lapopran	635.000.000
6	1	2	2	2	1	Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Inspektorat Kab. Mojokerto	4 laporan 6 kali	235,000,000	APBD		4 Laporan	235.000.000
6	1	2	2	2	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kab. Mojokerto	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400,000,000	APBD		24 Laporan	400.000.000
6	1	3				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Kabupaten Mojokerto	Level 3		APBD		3+	2.015.800.000
6	1	3	2	1		Perumusan Kebijakan Teknis di	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di	Inspektorat Kab.	4 dokumen	792,500,000	APBD		20 Rekomendasi	792.500.000

						Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Mojokerto	10 kali					
6	1	3	2	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Kab. Mojokerto	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217,500,000	APBD		10 Rekomendasi	217.500.000
6	1	3	2	1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Kab. Mojokerto	58 orang 4 kali	575,000,000	APBD		10 Rekomendasi	575.000.000
6	1	3	2	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kab. Mojokerto	301 dokumen 128 kali	2,611,800,000	APBD		48 Perangkat Daerah	2,611,800,000
6	1	3	2	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1,160,800,000	APBD		48 Perangkat Daerah	1.160.800.000
6	1	3	2	2	2	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 OPD 12 OPD	350,000,000	APBD		48 Perangkat Daerah	350.000.000
6	1	3	2	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab. Mojokerto	48 kali 41 laporan 48 kali	952,500,000	APBD		12 Kegiatan	952.500.000
6	1	3	2	2	4	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Mojokerto	12 kali	148,500,000	APBD		48 Perangkat Daerah	148.500.000
JUMLAH TOTAL											20,386,510,977			20,386,510,977

Sumber : Perencanaan, 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Rencana Kerja dan Pendanaannya. Adapun rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebesar Rp13.739.775.998,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Delapan Rupiah) sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD : Inspektorat

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH							13.739.775.998					
		INSPEKTORAT DAERAH							13.739.775.998					
1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	L		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,16	Kabupaten Mojokerto	12,865,429,639	-	0	-	0	-
						INOVASI	1	Inspektorat Kab. Mojokerto						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	L	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	8,000,000	-	0	-	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	4,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyusunan Dokumen Renstra</i>			<i>Dokumen Renstra PD</i>		1 Dokumen							
		<i>Penyusunan Dokumen Renja</i>			<i>Dokumen Renja</i>		1 Dokumen							
		<i>Penyusunan Dokumen Renja Perubahan</i>			<i>Dokumen Renja Perubahan</i>		1 Dokumen							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	4,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan</i>			<i>Dokumen Laporan Capaian Kinerja</i>		1 Dokumen							
		<i>Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP)</i>			<i>Dokumen Laporan Kinerja</i>		4 Dokumen/Triwulan							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		93%	Inspektorat Kab. Mojokerto	10.620.462.000	-	0	-	0	-

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54 Orang/ Bulan	Inspektorat Kab. Mojokerto	10.620.462.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyediaan Gaji ASN</i>			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		54 Orang/ Bulan							
		<i>Penyediaan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)</i>			<i>Jumlah ASN yang Menerima TPP</i>		54 Orang/ Bulan							
		<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</i>			<i>Honorarium yang dibayarkan</i>		54 Orang/ Bulan							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	-					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</i>			<i>Dokumen LPJ</i>		12 Laporan							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	-					
		<i>Rincian :</i>												
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		13 Dokumen		-					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	L	IP ASN Perangkat Daerah		62	Inspektorat Kab. Mojokerto	1,000,000,000	-	0	-	0	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	-					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Biaya penyediaan pakaian dinas ASN</i>			<i>Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas</i>		1 Paket							
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					54 Orang/120 jam/Tahun	Badan Diklat BPK, BPKP atau vendor	1,000,000,0000					
		<i>Rincian :</i>												

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan kepada PPUKD dan Auditor pada Inspektorat Kab. Mojoekrto dengan target 120 jam diklat/orang/tahun</i>			Jumlah PPUKD dan Auditor yang melaksanakan Pendidikan dan Latihan		56 Orang/120 jam/Tahun	Badan Diklat BPK, BPKP atao vendor						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	547.710.215	-	0	-	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	5,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor</i>			<i>Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>		1 Paket							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LED, Printer dll.		2 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	323,307,854					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			<i>Paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.</i>		2 Paket		323,307,854					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		380 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	255.000.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat</i>			<i>Paket penyediaan makanan dan minuman rapat</i>		380 Paket							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	44.021.016					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penyediaan barang cetakan</i>			<i>Paket Barang cetakan</i>		1 Paket							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	5,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya</i>			<i>Jumlah surat kabar dan bahan bacaan lainnya</i>		12 Dokumen							

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Bahan/ Material			Jumlah Paket/ Bahan Material yang Disediakan		1 Paket	Inspektorat Kab. Mojokerto	55.593.984					
		<i>Rincian :</i>												
		Penyediaan alat tulis kantor			Paket penyediaan alat tulis kantor		1 Paket							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	10,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu			Laporan penyediaan makan dan minuman untuk tamu		12 Laporan							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	127,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		Biaya perjalanan dinas dalam daerah ASN Inspektorat			Laporan Perjalanan Dinas dalam daerah		12 Laporan							
		Biaya perjalanan dinas luar daerah ASN Inspektorat			Laporan perjalanan Dinas Luar Daerah		12 Laporan							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	-	-	0	-	0	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	-					Permintaan Pak Inspektur
		<i>Rincian :</i>												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	L	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	Inspektorat Kab. Mojokerto	255.300.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	-					
		<i>Rincian :</i>												
		Penyediaan Paket Pengiriman Dokumen			Laporan Penyediaan Paket Pengiriman Dokumen		12 Laporan							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	120,800,000					
		<i>Rincian :</i>												

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan jasa Komunikasi dan wifi			Laporan Penyediaan jasa komunikasi dan Wifi		12 Laporan							
		Penyediaan Jasa Listrik			Laporan Penyediaan jasa listrik		12 Laporan		120,800,000					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	134.500.000					
		<i>Rincian :</i>												
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (8 orang)			Laporan Penyediaan jasa kerja Harian Lepas selama 1 Tahun (8orang)		12 laporan							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		94%	Inspektorat Kab. Mojokerto	156.744.785		0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		16 Unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	52.840.000					
		<i>Rincian :</i>												
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional			Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		16 Unit							
		Biaya perizinan dan pajak kendaraan Dinas / Operasional			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang telah dibayar PKB		16 Unit							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	73.904.785					
		<i>Rincian :</i>												
		Biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			Jumlah waktu pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor		1 Unit							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		60 unit	Inspektorat Kab. Mojokerto	30,000,000					
		<i>Rincian :</i>												
		Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor			Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor		60 Unit							

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	L		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%	Kabupaten Mojokerto	545.897.759		0	-	0	-
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	L	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal		477 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	400.897.759	-	0	-	0	-
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		4 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	26.825.750					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Menilai kinerja pelaksanaan program meliputi 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)</i>			<i>Jumlah Laporan Audit Kinerja</i>		4 laporan							
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		52 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	111.300.350					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada 48 Perangkat Daerah</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>		48 LHP							
		<i>Monitoring pengelolaan keuangan daerah pada 16 Perangkat Daerah</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring</i>		16 LHM							
		<i>Pemeriksaan Dana BOS SD dan SMP</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>		36 LHE							
		<i>Evaluasi BUMD</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi</i>		1 LHE							
		<i>Pemeriksaan Kas dan Persediaan Akhir Pada Perangkat Daerah</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>		1 LHP							
		<i>Evaluasi Pelaksanaan Hibah</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi</i>		1LHE							
		Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		49 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	28.495.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)</i>			<i>Evaluasi SAKIP OPD</i>		58 LHR							
		<i>Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</i>			<i>Reviu LPPD</i>		1 LHR							
		Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		8 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	51.043.300					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Reviu Laporan Keuangan (LKPD)</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu</i>		1 LHR							

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Reviu Penyerapan Anggaran Reviu DAK Fisik			Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran		16 LHR							
		Pengawasan Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		36 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	165.954.359					
		Rincian :												
		Pemeriksaan Keuangan Desa dan Pemeriksaan Dana Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		18 LHP							
		Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keuangan Desa		18 LHE							
		Kerjasama Pengawasan Internal			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		6 Kesepakatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	-					
		Rincian :												
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		6 Kesepakatan							
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	Inspektorat Kab. Mojokerto	17.279.000					
		Rincian :												
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK		1 Dokumen							
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Rakorwasda, Rakorwas Tingkat Provinsi dan Nasional		1 Dokumen							
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	L	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		46 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	145.000.000	-	0	-	0	-
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani		4 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	25,000,000					
		Rincian :												
		Unit Pengendalian Gratifikasi			Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK		2 Laporan							
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah			Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah		2 laporan							
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		20 Laporan	Inspektorat Kab. Mojokerto	120,000,000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tematik atau insidental)</i>			<i>Jumlah Laporan yang diperiksa berdasarkan tujuan tertentu</i>		2 Laporan							
		<i>Penanganan Pengaduan Masyarakat</i>			<i>Jumlah Laporan penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan Masyarakat</i>		18 Laporan							
3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	-	L		Level Kapabilitas APIP	3	Kabupaten Mojokerto	328.448.600		0	-	0	-
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	L	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		3 Rekomendasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	58.540.000	-	0	-	0	-
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		3 Rekomendasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	58.540.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3</i>			<i>Dokumen penilaian mandiri Kapabilitas APIP</i>		1 Dokumen							
		<i>Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengawasan</i>			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengawasan</i>		1 Dokumen							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		10 Rekomendasi	Inspektorat Kab. Mojokerto	-	dihapus				
		Pendampingan dan Asistensi	-	L	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi		46 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	269.908.600	-	0	-	0	-
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		46 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	61.648.800					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah : (RPJMD, P-RKPD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Perubahan, KUA - PPAS dan Perubahan, RKA dan perubahan)</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah</i>		132 LHR							
		<i>Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</i>			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)</i>		1 Laporan							

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Evaluasi perencanaan dan Penganggaran berbasis gender (Responsive gender) (mendukung kegiatan PUG)			Jumlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		16 LHE							
		Asistensi / pendampingan / Konsulting dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi / Pendampingan / konsulting yang dilakukan		4 laporan							
		Pendampingan BPK			Jumlah hari pendampingan pengawasan/pemeriksaan BPK		2 laporan							
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		46 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	50,000,000					
		Rincian :												
		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK / WBBM		1 kegiatan							
		Reviu LHKPN			Reviu atas kelayakan penyajian Laporan LHKPN		1 laporan							
		Verifikasi LHKASN			Verifikasi Kelayakan penyajian Laporan LHKASN		1 laporan							
		Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan			Jumlah Laporan Benturan Kepentingan		1 laporan							
		Kegiatan Penanganan Whistle Blowing Sistem			tindak lanjut penanganan tindak lanjut pengaduan melalui WBS		1 laporan							
		Evaluasi Pelayanan Publik			Penilaian Pelaksanaan unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik		32 unit kerja							
		Penilaian Zona Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas		4 Perangkat daerah							
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		12 Kegiatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	143.259.800					
		Rincian :												
		Reviu MCP Area Intervensi Pengawasan APIP			Jumlah Laporan Hasil Reviu		11 laporan							

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Tindaklanjut SABER PUNGLI		20 kegiatan							
		Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pencapaian MCP			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi		10 kali							
		Pelaksanaan Hakordia			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Hakordia		1 Kegiatan							
		Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Itegritas			Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		46 Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	15.000,000					
		Rincian :												
		Koordinasi Survei Penilaian Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Survei Penilaian Integritas (SPI)		46 Perangkat Daerah							

CATATAN PENTING :

1	Pagu Infdikatif Sesuai Rancangan RENJA 2025	Rp	13,100,000,000.00	APBD
2	Usulan Tambahan Pagu	Rp	639,775,998.00	APBD
	Total Usulan (APBD)	Rp	639,775,998.00	
	Jumlah	Rp	13,739,775,998.00	

Sumber : Perencanaan, 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini merupakan rancangan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan- bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto, sedangkan landasan operasional berdasarkan dokumen perencanaan tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah Rencana Kerja OPD untuk menyusun *action plan* yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKAP OPD), dalam rangka hal tersebut Inspektorat Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelolapemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, April 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199003 1 006